

TERORISME: ANTARA AKSI DAN REAKSI (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern)

Imam Mustofa *

Abstrak: Beberapa intelektual dan peneliti menyimpulkan bahwa faktor pemicu terorisme adalah ideologi atau agama. Dalam hal ini gerakan Islam radikal seringkali dituduh sebagai pemicu dan pelaku berbagai aksi teror tersebut. Memang harus diakui, bahwa ideologi agama sedikit banyak berpengaruh terhadap munculnya aksi radikalisme. Teks-teks agama yang ditafsirkan secara atomistik, parsial-monolitik (*monolithic-partial*) akan menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama. Kebenaran agama menjadi barang komoditi yang dapat dimonopoli. Ayat-ayat suci dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan radikal dan kekerasan dengan alasan untuk menegakkan kalimat Tuhan di muka bumi ini. Aksi radikalisme inilah yang sering mengarah kearah aksi teror. Oleh karena itu perlu ada dialog dalam masalah pemahaman agama.

Some intellectuals and researchers concluded that the trigger of terrorism are ideology and religion. In this case, Islamic radical is often accused of being the trigger and the actor of various terror acts. It must be recognized that the religious ideology more or less influence on the emergence of radical action. Religious texts are interpreted atomistic, monolithic-partial will lead to a narrow view of religion. Religious truth becomes a commodity item that can be monopolized. The verses in the Al-Qur'an have become justification for radical and violent actions with the reason to uphold the word of God in this earth. The radicalism action often leads to acts of terror. Therefore, we

* STAIN Jurai Siwo Metro Lampung

needs a forum for dialogue in dealing with religious understanding.

Kata Kunci: parsial-monolitik, fundamentalisme, Ikhwanul Muslimin

A. PENDAHULUAN

Aksi terorisme yang semakin mencuat satu dekade terakhir mendorong berbagai elemen masyarakat dunia mencari jalan penyelesaiannya. Berbagai studi dan penelitian dilakukan untuk menelusuri faktor yang melatarbelakangi aksi terorisme yang muncul di hampir seluruh dunia. Beberapa intelektual dan peneliti menyimpulkan bahwa faktor pemicu terorisme adalah ideologi atau agama. Dalam hal ini gerakan Islam radikal seringkali dituduh sebagai pemicu dan pelaku berbagai aksi teror tersebut.

Berdasarkan laporan *Patterns of Global Terrorism 2000* yang dikeluarkan pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideologi paling banyak terjadi. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 43 kelompok teroris internasional utama yaitu: (1). 27 kelompok sub kelompok misi religius fanatik yang terdiri dari 18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen/Katolik, dan 1 kelompok menganut sekte Aum; (2). 12 sub kelompok berbasis ideologi, yaitu Marxisme dengan berbagai variasinya; dan (3). empat sub kelompok etno-nasionalisme (Widjajanto, <http://www.lawmuliadi.com>, 2011 dan AM. Hendropriyono, 2007: 126-128.)¹

Neil J. Smelser menyatakan bahwa berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, agama dan lain-lain memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir yang terlibat dalam terorisme, namun kondisi tersebut tidak lantas menjamin dilakukannya

1. Di Indonesia sendiri, sebagian besar gerakan terorisme diduga memiliki motif agama, misalnya gerakan yang dilakukan oleh kelompok *al-Jama'ah al-Islamiyah* (JI). Gembong teroris yang telah tertangkap seperti Noordin M Top dan dr. Azhari berasal dari kelompok JI. Salah satu ajaran yang diyakini oleh JI menyatakan bahwa undang-undang yang dibuat parlemen Indonesia merupakan hasil perbuatan *syirik* karena menyaingi Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Pemerintah yang tidak menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits secara *kaffah* dianggap sebagai pemerintah sekuler yang merupakan *thoghut* dan wajib diperangi. Atas dasar tersebut, maka JI berkeyakinan bahwa aksi teror yang dilakukan di Indonesia merupakan *jihad*. JI didirikan pada tahun 1993, dan sejak tahun 1999 Markas Besar AJAI (*Qoidah Aminah*) disepakati berlokasi di Indonesia.

kekerasan. Untuk dapat terjadi kekerasan biasanya harus digabungkan dengan faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi yang ditanamkan oleh pemimpin karismatik, pengembangan sistem rekrutmen yang efektif, dan lain-lain (Smelser, 2007: 12). Pernyataan ini pada dasarnya menegaskan bahwa ideologi agama dengan teks-teks tertentu bisa menjadi pemicu aksi kekerasan dan terorisme. Hal ini memang sulit untuk dielakkan. Namun demikian, aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang mengatasnamakan jihad untuk membela Tuhan dan kebenaran bukan berarti kesalahan teks atau agama itu sendiri. Hal ini terjadi karena kuarngtepatan dalam interpretasi teks-teks dan ajaran agama Islam. Di samping itu, tidak adanya kontekstualisasi terhadap interpretasi tersebut juga ikut menyumbang “kesalahan” pada aksi implementasi teks dan ajaran agama tersebut.

Tesis Samuel P. Huntington tentang “Benturan Peradaban (*Clash of Civilization*)” tidak jarang diinterpretasikan lebih jauh. Pada tataran yang lebih nyata, aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian umat Islam antara lain didorong oleh perasaan iri dan dengki terhadap kemajuan kebudayaan dan peradaban dunia Barat. Peradaban yang tumbuh dan menjadi identitas budaya tidak jarang menimbulkan saling curiga, rivalitas, ketegangan dan bahkan sampai menimbulkan konflik peradaban. Konflik tersebut bisa saja bersumber dari perbedaan ideologi dan persepsi terhadap iptek.

Pada dasarnya sampai saat ini masyarakat dunia, khususnya Barat memahami Islam sebagai sebuah peradaban yang kaya akan konsep-konsep keilmuan, alam semesta, manusia, jiwa, kebahagiaan dan sebagainya. Namun, apa substansi ajaran Islam dan apa pentingnya bagi peradaban manusia nampaknya ditutup-tutupi oleh kebanyakan orang Barat. Barat malah melihat Islam sebagai agama yang mengancam peradaban Barat. Bahkan Islam dilihat oleh banyak orang Amerika sebagai budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai-nilai budaya mereka (A. Gerges, 2002:9). Huntington (1996),² misalnya, melihat Islam sebagai tantangan Barat terpenting dan karena itu ia menyarankan

2. Huntington mengarahkan Barat untuk memberikan perhatian khusus kepada Islam. Menurutnya, di antara berbagai peradaban besar yang masih eksis hingga kini, hanya Islamlah satu-satunya peradaban yang berpotensi besar dan mengguncang peradaban Barat sebagaimana dibuktikan dalam sejarah.

persatuan dan kesatuan antara Amerika dan Eropa ditingkatkan untuk menghadapi Islam (Hidayat, No. 2 Vol. 1 2005: 127).³

Persatuan bukan hanya dalam bentuk militer dan ekonomi, tapi juga moralitas dan nilai-nilai Barat. Amerika dan bangsa-bangsa Barat lain hendaknya menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada peradaban lain (Fahmi Zarkasyi, *Memahmi Barat*, dalam Jurnal Islamia Vol. III No. 2/Januari-Maret 2007: 8).

PEMBAHASAN

A. Dari Islamisme, Radikalisme ke Terorisme: Potret sebuah Gerakan

Memang harus diakui, bahwa ideologi agama sedikit banyak berpengaruh terhadap munculnya aksi radikalisme. Teks-teks agama yang ditafsirkan secara atomistik, parsial-monolitik (*monolithic-partial*) akan menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama. Kebenaran agama menjadi barang komoditi yang dapat dimonopoli. Ayat-ayat suci dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan radikal dan kekerasan dengan alasan untuk menegakkan kalimat Tuhan di muka bumi ini. Aksi radikalisme inilah yang sering mengarah kearah aksi teror.

Gejala Islam radikal di Indonesia memang bukan hal baru, sebab gerakan ini mempunyai ikatan historis muslim negeri ini, karenanya persoalan terorisme dengan Islam radikal tidak dapat dipisahkan. Gerakan ini ada yang terinspirasi oleh Gerakan Revolusi Iran pada tahun 1979 dengan gerakan Islam Timur Tengah. Gerakan ini memang sedikit banyak mempengaruhi wacana pergerakan Islam di Indonesia (Maftuh Abegebrel, 2004: 737). Keberhasilan Revolusi Iran dan Gerakan Islam Timur Tengah (*al-Ikhwan al-Muslimun* Mesir dan Jamati Islami Pakistan) dalam memobilisasi massa untuk menentang pemerintah setempat, ternyata memberikan semacam *conceptual framework* bagi aktifis Islam Indonesia. Revolusi negeri para *Mullah* ini mengukuhkan kemenangan ideologi dan doktrin partikularitas yang secara "*fundamentalis*" khususnya yang berkaitan

3. Majalah *US News*, dalam edisinya terbaru menurunkan laporan panjang tentang perang pemikiran yang sedang diluncurkan Amerika Serikat. Dalam artikel yang ditulis oleh David E. Kaplan, diungkapkan bahwa pada front yang tersembunyi dalam perang melawan terorisme, Amerika membelanjakan jutaan dolar untuk mengubah wajah Islam. "*in an unseen front in the war on terrorism, America is spending millions to Change the Very Face of Islam*".

dengan isu kebangkitan Islam kontemporer *vis a vis* kekuasaan politik sekuler (Maftuh Abegebrel, 2004: 737).

Model di ataslah yang sering diadopsi oleh kalangan aktifis Islam kampus untuk mempelajari Islam melalui karya *think thank* gerakan ini, seperti Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. Kelompok ini secara konstan menganggap bahwa ideologi yang dikembangkan oleh kelompok "Islam Kanan" ini merupakan jalan terbaik untuk merubah nasib bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, kelompok ini menjadi semacam kekuatan sosio-politik baru dalam percaturan konstelasi Islam Politik di Indonesia (Maftuh Abegebrel, 2004: 738).

Sejauh ini, gejala Islam radikal atau yang sering disamakan dengan fundamentalisme Islam, memang banyak bermunculan dari kampus sekuler (Perguruan Tinggi Umum). Hal ini setidaknya dipicu oleh pemikiran sekuler yang berkembang di kampus Islam seperti IAIN yang dimotori oleh Harun Nasution dan Nurcholish Madjid (Maftuh Abegebrel, 2004: 738). Karena itu, para aktifis Islam yang belajar di kampus sekuler, menginginkan adanya proses pemebelajaran yang benar-benar "Islami". Dengan kata lain, mereka merujuk apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., yaitu membentuk *halaqah*, *harakah*, *liqa' daurah*, *rihlah* dan lain sebagainya (Maftuh Abegebrel, 2004: 739).

Fenomena ini memang sudah begitu menggejala sejak Orde Baru. Kelompok ini memang tidak melakukan aksi-aksi mengkhawatirkan, namun ada beberapa eksponen dari kelompok ini yang bergabung dengan kelompok Islam kanan dan terlibat dalam gerakan Islam radikal. Dalam kesehariannya, kelompok mahasiswa dari kampus sekuler ini memang agak sedikit berbeda, sehingga agak sulit menerima sesuatu "yang berbeda dengan mereka". Karena itu, seolah tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk orang lain di luar kelompok mereka. Kohesivitas sosial ini membentuk semacam paguyuban (*gemanischaft*) diantara sesama mereka (Maftuh Abegebrel, 2004: 740).

Implikasi dari kelompok ini memang menyebar pada tiga saluran yang agak mirip secara ideologi, namun berbeda dalam bidang aksi. *Pertama*, mereka yang masih bertahan pada paguyuban ini, secara nomina, melakukan aksi dalam organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Inonesia). *Kedua*, melalui partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera, dan *ketiga*, mereka

yang langsung bergabung dengan organisasi Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad dan lain sebagainya. Mereka terlibat langsung dalam medan peperangan di Maluku dan Ambon (Maftuh Abegebrel, 2004: 740). Kelompok inilah yang biasa disebut dengan istilah Islam radikal dengan paham radikalisme.

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya, radikalisme merupakan fenomena yang telah ada sejak manusia terlahir di dunia. Pada beberapa dekade belakangan ini, fenomena radikalisme seringkali dimanifestasikan sebagai islamisme, yakni aktivitas bernuansa agama yang menuntut reposisi peran Islam dalam politik ketatanegaraan. Islamisme di sini sebenarnya sangat kompleks, sehingga tidak bisa dijelaskan hanya dengan membuka sejarah-sejarah masa lalu. Bukan juga hanya dapat dimaknai dengan fanatisme keagamaan yang identik dengan gerakan kekerasan untuk tujuan surgawi. Namun islamisme tidak dapat terlepas dari gejala perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang menghampiri berbagai belahan dunia Islam (Hasan, 2010: 20).

Islamisme mulai menunjukkan pengaruhnya pada awal abad ke-20, yaitu ketika sistem ketatanegaraan modern menggantikan sistem kekhilafahan, keamiran, dan bentuk-bentuk feodal lainnya yang berbasiskan pada kekeluargaan dan kesukuan. Perubahan sistem ketatanegaraan membawa dampak kepada munculnya aktor-aktor politik baru yang menggeser dominasi status *quo*. Kemunculan Hasan Al-Bana sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin, Abul A'la Maududi sebagai pencetus Jama'at Islami di Indo-Pakistan, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pemahaman Islam sebagai ideologi politik (Hasan, 2010: 20). Kedua gerakan tersebut mengilhami pembentukan gerakan-gerakan serupa di berbagai belahan dunia Islam dengan obsesi untuk mengulang kebangkitan kekhilafahan yang berjaya berabad-abad yang lalu (Hasan, 2010: 20).

Dalam perkembangannya, Ikhwanul Muslimin memunculkan gerakan-gerakan sempalan yang sangat radikal di berbagai negara, seperti Hizbut Tahrir, Jama'ah Islamiyah (JI), Jihad Islam, Jama'at Takfir, Hamas, Hizbullah dan lain sebagainya (Hasan, 2010: 14). Munculnya gerakan radikalisme yang tidak lain adalah anak dari Islamisme tidak terlepas dari nuansa perjuangan politik, yaitu merupakan protes terhadap politik gaya Barat yang sekuler dan

sering tidak berpihak kepada umat Islam. Di samping itu, gerakan Islamisme muncul sebagai reaksi atas kegagalan rezim politik gaya barat yang justru banyak menimbulkan konflik, kemiskinan, pengangguran, korupsi, kolusi dan lain sebagainya (Ajami, 1992).

Meskipun seringkali dibungkam dengan aksi represif penguasa, namun gerakan Islamisme ini tetap berkobar dan tidak pernah sulut. Ada dua macam gerakan Islamisme yang muncul, yaitu Islamisasi dari bawah melalui dakwah dan kegiatan sosial keagamaan, dan Islamisasi dari atas dalam wujud jihad revolusioner untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Pemilihan atas strategi pergerakan tersebut biasanya tergantung pada kesempatan politik yang ada dan aktor-aktor yang memobilisasi. Aktor-aktor gerakan Islamisme seringkali dapat melakukan mobilisasi secara efektif pada saat negara dalam keadaan lemah dan dilanda konflik kepentingan (*conflict of interest*). Di Indonesia, aktor-aktor Islamisme seperti Habib Rizieq, Ja'far Umar Tholib, dan Abu Bakar Ba'asyir dapat memobilisasi gerakan Islamisme dengan memanfaatkan lemahnya negara pasca jatuhnya Soeharto. Mereka mendirikan kelompok-kelompok militan Islam, seperti Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Laskar Mujahidin dan lain sebagainya yang melakukan gerakan-gerakan semisal demonstrasi menuntut pemberlakuan syari'at Islam, merazia lokalisasi, diskotik, kafe, dan lain sebagainya, bahkan menggelar aksi "jihad" pada wilayah yang sedang dilanda konflik, terutama konflik yang dipandang bermotif agama, seperti di Poso dan Ambon (Hasan, 2002 dan Nathan, 2005).

Lahirnya gerakan militan Islam di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kebijakan restriksi Orde Baru terhadap aktifitas kampus melalui NKK-BKK. Di samping itu, penerapan asas tunggal pancasila dengan tafsir sepihak dari rezim Orde Baru juga turut memberikan andil terhadap munculnya gerakan militan Islam di kampus. Gerakan militan Islam di kampus ini bersifat transnasional karena banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan militan Islam di berbagai negara. Didirikannya LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Bahasa Arab) di Jakarta pada tahun 1980 yang membawa faham Wahhabi menjadi lahan masuknya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan Salafi.

Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir berkembang di dunia kampus melalui berbagai *halaqah* dan *daurah* yang dilaksanakan

pada berbagai tempat secara sembunyi-sembunyi. Pembawa gerakan ini biasanya dari alumni Timur Tengah. Kedua gerakan tersebut berkembang sangat cepat karena menggunakan sistem sel. Setiap sel terdiri dari beberapa kelompok yang dibimbing oleh seorang *murabbi*. Setiap anggota kemudian didorong untuk menyebarkan faham mereka melalui berbagai cara, seperti penyebaran buku, media atau ajakan untuk mengikuti halaqah atau daurah (Said Damanik, 2002: 88-93 dan Zakaria 1995: 17-18).

Sementara gerakan salafi mulai masuk ke Indonesia pada pertengahan 1980-an. Pengikut gerakan salafi ini memiliki ciri khas dalam penampilannya, yaitu untuk laki-laki biasanya memiliki jenggot panjang, berpakaian gamis, menggunakan sorban pada kepalanya, dan celana di atas mata kaki. Untuk perempuan biasanya menggunakan gamis warna hitam, kerudung yang lebar dan cadar (penutup muka). Gerakan salafi memperkenalkan ajaran Islam yang sangat tekstual dengan mengacu kepada keteladanan salafus shalih (muslim generasi awal). Para penganut gerakan ini secara ketat meniru segala hal yang dilakukan oleh salafus shalih sejak dari tata cara beribadah hingga berpakaian. Berbeda dengan kedua gerakan sebelumnya, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Takhir, gerakan salafi ini berusaha memisahkan diri dari aktivitas politik karena mereka menganggapnya sebagai *bid'ah*. Biasanya mereka cenderung eksklusif atau memisahkan diri dari masyarakat dan membuat komunitas sendiri.

Pemaparan di atas setidaknya menunjukkan adanya alur bahwa islamisme bisa jadi memicu radikalisme. Radikalisme inilah yang sering mengarah pada tindakan kekerasan dan terorisme.

B. Radikalisme Islam

Radikalisme dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikal dan radikalisme adalah sebenarnya konsep yang netral dan tidak bersifat pejorative (melecehkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif tetapi bisa juga dengan kekerasan. Dan dalam hal ini perlu dibedakan antara kekerasan fisik dengan kekerasan yang berbentuk simbolik atau wacana. Biasanya banyak pihak cenderung mengasosiasikan kekerasan dalam bentuk

fisik, seperti: penyerangan, pemukulan, pengrusakan dan sebagainya tetapi mengabaikan kekerasan simbolik atau wacana. Sedangkan provokasi, penglabelan, stigmatisasi, atau orasi yang agitatif, termasuk *hate speech*, *condoning* disepelekan dan bukan sesuatu yang dilihat sebagai kondisi yang memungkinkan eskalasi menuju kekerasan fisik (Hasani, 2011:19).

Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul: *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, kata *Radical* berasal dari bahasa Latin yaitu *Radix* yang berarti “*pertaining to the roots* (Memiliki hubungan dengan akar) (Reinhard Golose, 2010:79-80). Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal “Secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak” (Dikbud, 1995:808). Sementara itu *Encarta Dictionaries* mengartikan kata *radical* sebagai “*Favoring major changes: favoring or making economic, political or social changes of sweeping or extreme nature*” (membantu terjadinya perubahan-perubahan besar, terutama membantu terjadinya atau membuat perubahan ekonomis, politis, atau perubahan sosial secara luas atau ekstrim (Reinhard Golose, 2010:80).

Seorang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya. *A radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws of governments*. Seorang radikal adalah seorang yang menyukai perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan dari *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan dengan menggantinya dengan suatu yang baru sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan adalah revolusioner artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violenceri*) dan aksi-aksi ekstrim (Fakhrurrazi, www.imsakjakarta.files.wordpress.com, 8 Mei 2012).

Sebagai sebuah paham, radikalisme Islam tentu saja tidak dapat dipisahkan dari gerakan fundamentalisme Islam. Keduanya merupakan gerakan keislaman yang sehati seirama. Sama halnya seperti fundamentalisme Islam, term dan konsep radikalisme Islam bukan berasal dari rahim Islam, akan tetapi merupakan

produk impor dari Barat. Hingga detik ini, belum ada kesepakatan di antara pemerhati Islam mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikalisme Islam. Fazlur Rahman melabeli gerakan ini sebagai gerakan neorevivalisme atau neofundamentalisme sebuah gerakan yang mempunyai semangat anti Barat (Asroni, Volume VII, No. 1 2008: 17).

Rahman memandang kalangan fundamentalis secara sinis. Kelompok fundamentalisme dianggap sebagai orang-orang yang dangkal dan superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber pada al-Quran dan budaya intelektual tradisional Islam (Biyanto, Vol 7 No 2, 2006: 17). Namun, istilah fundamentalis bagi Espito terasa lebih provokatif dan bahkan pejoratif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai kelompok literlis, statis dan ekstrem. Pada gilirannya fundamentalisme sering merujuk kepada kehidupan masa lalu, bahkan lebih jauh lagi fundamentalisme sering disamakan sebagai ekstrimisme, fanatisme politik, aktivisme politik, terorisme dan Anti Amerika. Karena itu, John L. Es Posito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam (Fakhrurrazi, [www. //imsakjakarta.files.wordpress.com](http://www.imsakjakarta.files.wordpress.com), 8 Mei 2012).

Fundamentalisme Islam dapat mengekspresikan orientasi radikal. Radikal Islam memahami Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, dan memberikan perhatian kepada otentisitas kultural. Namun Islam bukanlah agama dalam pengertian barat, tetapi Islam adalah cara hidup yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Posisi ini berbeda dari kaum sekularis yang menolak intervensi agama dalam kehidupan publik, terutama politik. Manifestasi dari pandangan radikal adalah pada keharusan untuk mendirikan negara Islam yang didasarkan pada syari'ah. Perbedaan antara kaum radikal dan modernis adalah penegasan yang pertama terhadap keunikan Islam. Mereka dengan tegas menolak setiap usaha untuk mengidentifikasi Islam dengan demokrasi, kapitalisme, sosialisme atau ideologi barat lainnya. Hanya saja, berbeda dari Islamis atau neo-fundamentalis, radikalisme Islam memperbolehkan penggunaan cara kekerasan atau bahkan pembunuhan untuk mewujudkan agenda dan tujuan politiknya (Nur Fuad, [www.sunananempel. ac.id](http://www.sunananempel.ac.id), 18 Mei 2012).

Penelitian Lazuardi Birru dan LSI tahun 2010 memberikan pengertian radikalisme sebagai tindakan dan atau sikap atas paham yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi sikap toleran dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip kemanusiaan (Madya Ruth, 2010: 6).

Penelitian Lazuardi Birru tersebut memberikan tindakan radikalisme sosial keagamaan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atas dasar keyakinan agama. Sedangkan sikap radikalisme sosial keagamaan merupakan kecenderungan untuk membenarkan, mendukung atau menoleransi paham atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut atas dasar klaim paham keagamaan (Madya Ruth, 2010: 6).

Gerakan Islam yang lahir di akhir Orde Baru sampai Orde Reformasi sebagian menjadi gerakan-gerakan Islam yang radikal di Indonesia (Abduh, 2003: 8).⁴ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004 menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk sebuah buku berjudul “*Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*” ada empat kelompok yang mendapat cap sebagai “salafi radikal” dalam buku ini, yaitu Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (<http://salahudin-yuswa.blogspot.com>, 16 Mei 2012).

Radikalisme dapat dicirikan dan ditandai oleh tiga kecenderungan umum, yaitu: *Pertama*, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi penolakan atau bahkan perlawanan. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan-tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain. *Ketiga*, kuatnya

4. Ada sebagian orang, seperti Umar Abduh yang berpandangan bahwa radikalisme di Indonesia merupakan konspirasi kalangan inteljen, hal ini dilakukan dengan cara: *Pertama*, memasukkan intel seperti Bafana, Hambali, Al-Farouq, atau Abdul Haris ke dalam gerakan Islam, dan menjadikannya radikal, kemudian ditumpas. *Kedua*, membina orang dalam menjadi partner. Seperti yang mereka lakukan terhadap Teungku Fauzi Hasbi, Nurhidayat dan Sudarsono (provokator kasus Lampung 1989), Ahmad Yani Wahid (petinggi Jama'ah Imran, Kasus Cicendo Bandung, dan Pembajakan Woyla).

keyakinan kaum radikal terhadap kebenaran yang mereka bawa. Sementara Syafi'i Ma'arif memandang penganut Islam radikal adalah mereka yang karena kurangnya ilmu, bersikap defensif dan reaksioner, kemudian mencari jalan pintas yang radikal dalam upaya membela diri dengan menafsirkan ajaran agama secara sempit, subyektif, dan tidak bertanggung jawab. Prinsip kearifan dan lapang dada tidak lagi dihiraukan dalam mengatur langkah (S. Awwas, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 18 Mei 2012).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculan organisasi Islam yang berhaluan radikal. Abuddin Nata, sebagaimana dikutip Fakhurrazi, menyebutkan empat faktor yang melatarbelakangi lahirnya kaum fundemantis atau radikal, *pertama*, faktor modernisasi yang dapat dirasakan dapat menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dalam agama. *Kedua*, karena pandangan dan sikap politik yang tidak sejalan dengan sikap dan politik yang dianut penguasa. *Ketiga*, karena ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. *Keempat*, karena sifat dan karakter dari ajaran Islam yang dianutnya cenderung bersifat rigid (kaku) dan literalis (Fakhurrazi, [www.//imsakjakarta.files.wordpress.com](http://www.imsakjakarta.files.wordpress.com), 8 Mei 2012).

C. Respon terhadap Imperialisme dan Kolonialisme

Gerakan Islamisme memang merupakan respon sebagian umat Islam terhadap kemajuan kebudayaan dan peradaban dunia Barat. Mereka berpendapat bahwa apabila umat Islam ingin maju, maka kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah. Namun demikian, radikalisme dan terorisme bukanlah respon terhadap kemajuan dunia Barat, tetapi respon terhadap kolonialisme dunia Barat dan ketidakadilan global. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi Islam sebagai motif dominan terhadap munculnya terorisme tidaklah benar. Gerakan Islam radikal yang sering dicap sebagai teroris adalah respon terhadap imperialisme modern.

Dilihat dari pelakunya, terorisme dapat dikelompokkan menjadi lima golongan, yaitu nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi sosial, dan sayap kanan. Namun pengelompokan terorisme berdasarkan pelaku ini dianggap sebagai generalisasi karena motif terorisme sangat beraneka ragam dan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor

seperti psikologis, ekonomis, politis, agama, dan sosiologis (Djelantik, 2010: 25).

Sementara dari aspek penyebabnya, menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan kekerasan pada suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa, dan terjadinya perpecahan di dalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya (Djelantik, 2010: 25). Sementara menurut Loudewijk F. Paulus, terorisme mempunyai berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini antara lain, terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan; seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap pejuang Palestina; IRA (Irish Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Begitu pula dengan Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Selain itu, yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran dari Eropa. Namun akhir-akhir ini, terorisme telah bermutasi dari arena politik ke wilayah agama (F. Paulus, htm.www.Dephan.com, 15 Januari 2006).

Menurut Whittaker, terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu penyebab radikalisme dan terorisme (Whittaker, 2000:91-124). Parahnya, Islam yang menjadi sasaran tuduhan pemicu teror akhir-akhir ini (Juergensmeyer, 2003: 7).⁵ Pada dasarnya aksi terorisme

5. Pada dasarnya banyak aksi teror yang dilakukan oleh penganut agama lain, namun yang selalu disorot hanyalah umat Islam. Sebagai contoh, peledakan truk dan bis-bis di Inggris yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Katholik Irlandia; serangan gas beracun yang menebar maut yang dilakukan oleh para anggota sekte Hindu-Budha; pengeboman klinik aborsi yang dilakukan oleh para ekstrimis agama Kristen di Amerika, dan serangkaian teror lainnya yang dilakukan dengan membawa simbol agama.

yang marak akhir-akhir ini sebenarnya bukan dilatarbelakangi oleh ajaran agama. Aksi kekerasan tersebut muncul lebih mengarah pada reaksi oleh kelompok yang kecewa terhadap ketidakadilan global dan tindakan negara-negara Barat. Ketika AS sebagai lambang kapitalisme dan sekularisme mendominasi peradaban Barat, karakteristik benturan kepentingan tidak lagi dibangun atas konsep teologis dan ideologis. Konflik peradaban lebih dibangun atas kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan.

Adanya kolonialisasi modern dengan penguasaan wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Robert Dreyfuss dalam bukunya "*Devil's Game; How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*" menyebutkan bahwa sebenarnya yang memunculkan terorisme di dunia adalah Amerika. Dreyfuss menyimpulkan bahwa kepentingan *politik-ekonomi* Amerika Serikat dan beberapa sekutunya ikut menumbuhkan gerakan Islam radikal dan terorisme di seluruh penjuru dunia. Kebencian kaum radikal Islam terhadap *komunisme-ateis* dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Amerika Serikat untuk menghadang pengaruh Uni Soviet di gurun pasir Timur Tengah, termasuk juga negara-negara berhaluan *sosialis marxis* lainnya. Lebih dari itu, seperempat kekayaan minyak dunia yang tersimpan di kawasan tersebut menjadi faktor paling dominan skenario *Clash of Civilization* yang didesain Amerika (Dreyfuss, 2007).

Isu terorisme menjadikan teori benturan peradaban (*clash of civilization*) seolah benar. Padahal yang terjadi bukanlah benturan peradaban, akan tetapi benturan kepentingan. Fundamentalisme Islam lahir sebagai respon terhadap kepentingan dan kolonialisme Barat serta ketidakstabilan politik global. Selain itu, memang tidak dipungkiri bahwa ideologi agama tidak jarang menjadi faktor dan sekaligus justifikasi fundamentalisme. Namun demikian, faktor yang paling dominan adalah ketidakadilan global dan kolonialisme modern yang dimainkan oleh negara-negara Barat. Lebih tragisnya lagi kolonialisme dan kerakusan akan kekayaan alam, terutama migas, dijustifikasi dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Hal ini dikuatkan oleh John L. Esposito yang mengungkapkan bahwa ada beragam tipe jawaban dalam Islam atas terjadinya kolonialisme yang dapat dilihat sampai sekarang ini, yaitu

ada yang mengadakan perlawanan dan peperangan, penarikan diri dan non-kooperasi, sekularisasi dan westernisasi, dan modernisasi Islam. Kelompok pertama dan kedua inilah yang terkadang menjadikan cap atas Islam sebagai “agama teroris”. Kelompok pertama dan kedua ini, menurut Esposito, adalah kelompok yang berupaya mengikuti teladan Nabi saw., berhijrah dari wilayah yang tidak lagi di bawah aturan Islam dan berjihad guna membela agama dan negeri-negeri Islam (L. Esposito, 2006: 94). Tipe kebangkitan Islam, baik yang dilakukan oleh kelompok pertama maupun kedua inilah, menurut Hilaly Basya, bentuk sikap reaktif yang dimaknai sebagai resistensi identitas, dimana Barat yang diasumsikan sebagai pemilik modernitas terlalu mendominasi dan memonopoli kebenaran. Lebih lanjut dikatakan, karena resistensi tersebut dilakukan dengan menyertakan sentimen identitas, maka subjektifitasnya lebih memainkan peran ketimbang sebagai sebuah representasi objektif (Basya, 24 Juni 2005).

Noam Chomsky, pakar linguistik pada the Massachusetts Institute of Technology mengatakan *"we should not forget that the US itself is a leading terrorist state"*. Dia juga menyatakan bahwa pengeboman atas Afghanistan (oleh pasukan sekutu pimpinan AS) adalah kejahatan lebih besar dari pada teror 11 September, AS adalah terdakwa negara teroris. Edward S. Herman, guru besar di Universitas Pennsylvania, dalam bukunya *The Real Terror Network* (1982), mengungkapkan fakta-fakta keganjilan kebijakan antiterorisme AS. selama ini AS merupakan pendukung rezim-rezim "teroris" Garcia di Guatemala, Pinochet di Chili dan rezim Apartheid di Afrika Selatan (S. Herman, 1982: 76-79).

AS dan para sekutunya bertindak diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu sebagai bentuk ketidakadilan global yang terjadi di banyak Negara, khususnya Negara muslim. Yang paling nyata adalah invasi AS terhadap Afganistan dan Irak yang diwarnai oleh penyiksaan terhadap para tahanan; kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap para pejuang Palestina. ketidakadilan dan standar ganda yang diterapkan oleh AS inilah yang memupuk rasa kebencian kalangan Islam Fundamentalists terhadap Barat, terutama Amerika.

Apa yang dilakukan Israel terhadap para pejuang Palestina jelas-jelas tindakan teror, namun AS, sebagai Negara yang mengaku

panglima perang perlawanan terhadap terorisme, Negara yang mengaku penjunjung nilai-nilai HAM dan kebebasan bungkam seribu bahasa seakan mengamini tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Israel.

Bahkan kekuatan Iperialisme AS dan sekutunya menekan Negara-negara lemah dalam bidang ekonomi dan politik. Michael Barratt-Brown mengatakan bahwa imperialisme tidak diragukan lagi masih merupakan kekuatan paling besar dalam kaitan ekonomi, politik, dan militer yang dengannya negeri-negeri yang secara ekonomi kurang berkembang tunduk pada mereka yang secara ekonomi lebih berkembang (Barratt-Borown, 1970: viii). Kebrutalan ini sudah berjalan cukup lama. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat menjalankan politik aktif untuk melakukan intervensi langsung dan terbuka dalam permasalahan di Amerika Tengah dan Selatan: Kuba, Nikaragua, Panama, Chili, Guatamela, Salvador, Grenada telah merasakan bagaimana kedaulatan mereka diserang, mulai dari peperangan langsung hingga kudeta-kudeta dan tindakan-tindakan subversi yang diakui secara terbuka, dari usaha-usaha pembunuhan hingga pemberian bantuan keuangan untuk pasukan-pasukan 'kontra'. Di Asia Timur, Amerika terjun dalam beberapa perang besar, membiayai tindakan-tindakan militer massa yang menyebabkan beratus-ratus ribu orang meninggal di tangan pemerintahan Negara yang 'bersahabat' dengan mereka, menggulingkan pemerintahan (Iran, Israel) (W Said, 1996: 377).

Dalam bidang Informasi dan pemberitaan, kebrutalan Barat, khususnya Amerika memang menjadi ancaman yang serius bagi kemerdekaan Negara-negara lemah dan berkembang di millennium ketiga ini. Anthomi Smith dalam *Geopolitics of Information* menyatakan bahwa ancaman terhadap kemerdekaan pada akhir abad kedua puluh dari ilmu elektronika baru dapat menjadi lebih besar daripada kolonialisme itu sendiri (Smith, 1980:176). Dalam bidang militer, penguasaan terus dilakukan oleh AS meskipun perang dingin telah berakhir. Tahun 2003, hanya dalam beberapa hari saja, mereka sanggup mengganti penguasa di Irak yang sebelumnya mereka menggulingkan rezim Taliban dengan relatif mudah. Tentara Amerika merajalela di berbagai Negara. Kini, AS memiliki sekitar 1.700 instalasi militer yang tersebar di serarus Negara. Suatu gambaran yang menurut Chakmers Johnson, mencerminkan bentuk

baru imperialisme (Husaini, 2005: 127). Maka wajarlah apabila Nuqaib Al-attas mengatakan bahwa belum pernah ada peradaban manusia yang membahayakan umat manusia, binatang, tumbuhan dan bahan mineral, seperti peradaban Barat (Husaini, 2005: 124).

Dalam tataran politik internasional, aksi terorisme atas nama agama dapat dipicu oleh beberapa provokasi, misalnya kasus kartun Nabi Muhammad yang dibuat kartunis asal Denmark, film FITNA karya Geert Wilders, malpraktek di Guantanamo Bay, kisah penjara Abu Gharib, serta perang Afganistan dan Irak, dan yang terbaru adalah pembunuhan empat diplomat Amerika Serikat di Benghazi, Libya sebagai respon terhadap munculnya provokasi film yang menghina umat Islam "*Innocence of Muslim*" yang dibuat oleh orang Yahudi-Israel berkebangsaan Amerika, Sam Bacile (Hasan, 2010: 20).

D. Bersama Mencari Solusi

Pasca terjadinya tragedi 11 september 2001, hampir semua Negara yang mempunyai kelompok Islam garis keras berupaya sekuat tenaga untuk menyumbangkan berbagai pandangan untuk mengatakan bahwa umat Islam bukan teroris, dan tidak semua aksi teroris itu mewakili umat Islam. Namun demikian hal ini belum mampu menepis kecurigaan Barat terhadap Islam. Oleh Karena itu baik dari kalangan Islam maupun Barat yang mayoritas beragama Kristen bersepakat untuk intens mengadakan dialog antaragama dan peradaban. Paus Johannes Paulus II dan Paus Benekditus XVI sendiri sangat menghormati umat Islam dan bersedia berdialog dengan kalangan Islam.

Banyak tokoh dan intelektual Barat, seperti John L Esposito, Noam Chomsky dan Robert W Hefner yang cukup memahami Islam. Begitu juga kalangan Islam moderat memahami pola pikir Barat, khususnya dalam politik internasional. Oleh karena itu, dialog dalam rangka menumbuhkembangkan toleransi antara peradaban menjadi suatu yang sangat urgen. Hal ini demi untuk saling memahami dan menerima kebudayaan satu sama lain, sehingga benturan peradaban yang dikemukakan oleh Huntington tidak menjadi kenyataan. Sr Patricia Madigan, intelektual Australia menyatakan bahwa dialog antarkelompok moderat dari komunitas berbeda akan mempersempit gerak orang-orang yang ingin

melakukan kekerasan. Selain itu, dialog semacam ini menjadi sarana untuk memahami agama orang lain sekaligus mempertebal iman. Mgr Rey Manuel Mousanto, peserta dari Filipina, mengatakan, di negaranya sudah ada konferensi uskup dan ulama sejak tahun 1990-an guna mengurangi prasangka agama di Filipina (Kompas, 7/12/2004).

Sebenarnya ide diadakannya dialog antarperadaban dan antaragama ini sudah lama muncul. Pada tanggal 23-24 Maret 1995, di Jakarta pernah diadakan seminar internasional tentang Islam dan Barat dalam Era Globalisasi (Madjid et all, 1996: ix). Selanjutnya pada tahun 1996, Perdana Menteri Turki, Necmettin Erbakan dalam makalahnya untuk konferensi IIFTIHAR (*International Institute for Technology and Human Resource Development*) di Jakarta mengajukan tema "Dialog Peradaban" (*Dialogue among Civilization*). Usul ini didukung dan dikembangkan oleh intelektual muslim lain, seperti B.J Habibie dan Anwar Ibrahim (Husaini, 2005: 131-132).

Dialog antarperadaban adalah proses komunikasi dua arah dari dua atau lebih peradaban yang berbeda yang dilakukan oleh aktor dalam berbagai lapisan pemerintahan dan civil society dengan tujuan utama timbulnya saling pengertian dan kerja sama. Dialog dipahami sebagai *conversation of cultures*, yang berlangsung dalam ruang masyarakat internasional yang memiliki kesamaan komitmen dan berdasarkan penghargaan yang lain sebagai sejajar. Percakapan ini menuntut perenungan dan empati. Perbedaan peradaban mengharuskan, meminjam Habermas, suatu aksi komunikatif (*communicative action*) dalam ruang publik.

Dialog antarperadaban sebagai upaya untuk mencari titik temu (*coomon platform*) yang dalam bahasa al-Quran *kalimatun sawa*. Titik temu ini bisa berupa upaya untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan bersama (*common challenges*) seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, penegakan HAM, terorisme, korupsi dan masalah-masalah lainnya. Bukan hanya itu, dialog perlu dilakukan sebagai upaya untuk saling memahami dan menghargai atas berbagai perbedaan persepsi terhadap isu-isu tertentu.

Ide ini mendapat sambutan yang sangat positif, khususnya dari kalangan moderat. Hal ini tercermin dari banyaknya lembaga-lembaga yang memprakarsai dialog antarperadaban. Dialog itu

sendiri esensinya ingin menghadirkan citra diri secara seimbang dan proporsional. Dialog dilakukan karena disadari ada perbedaan atau bahkan konflik, karena dunia berkarakter plural. Pluralisme peradaban merupakan perbedaan perspektif dalam memahami dunia. Pluralisme peradaban agak berbeda dengan pluralisme jenis-jenis lain seperti gender, ras, agama, dan suku. Pluralisme peradaban juga agak berbeda dengan multikulturalisme yang diartikan sebagai kemajemukan budaya dalam sebuah komunitas negara-bangsa.

Untuk mengintensifkan dialog antaragama dan peradaban ini peran organisasi-organisasi Islam sangat diperlukan. Untuk tingkat Internasional seperti OKI dan Liga Arab, untuk tingkat nasional, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah serta lembaga pemerinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Departemen Agama. Tokoh-tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan pemahaman ajaran-ajaran agama melalui kurikulum pendidikan Islam secara komprehensif. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam memahami teks-teks agama yang berpotensi untuk disalahtafsirkan demi menjustifikasi anarkisme atau terorisme.

KESIMPULAN

Terorisme bukanlah aksi yang muncul di ruang hampa. Apabila ditelaah secara obyektif, Islam dan umat Islam bukanlah pemicu utama munculnya aksi terorisme. Terorisme bukanlah respon Islam terhadap kemajuan kebudayaan dan peradaban Barat. Adanya aksi kekerasan yang muncul dari sebagian umat Islam merupakan respon terhadap kejahatan kemusiaan dan “*the real terror*”, imprealisme modern dari negara-negara Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat serta ketidakadilan global terhadap negara-negara berkembang, khususnya negara muslim.

Solusi bersama untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme adalah dengan melakukan dialog antar agama antar peradaban. Dialog dilakukan karena disadari ada perbedaan atau bahkan konflik, karena dunia berkarakter plural. Pluralisme peradaban merupakan perbedaan perspektif dalam memahami dunia. Pluralisme peradaban agak berbeda dengan pluralisme jenis-jenis lain seperti gender, ras, agama, dan suku. Pluralisme peradaban juga agak berbeda dengan multikulturalisme yang diartikan sebagai kemajemukan budaya dalam sebuah komunitas negara-bangsa.

Namun demikian, Dialog tidak akan berarti dan tidak akan menjadi solusi bagi kekerasan, terorisme, termasuk yang mengatasnamakan agama, selama penjajahan dan provokasi permusuhan masih terus dilakukan.

REFERENSI

- A. Gerges, Fawaz, *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, (Alih Bahasa Kili Pringgogidgo dan hamid Basyaib), (Jakarta: AlvaBet, 2002).
- Abduh (Penyunting), Umar, *Konspirasi Intelegen dan Gerakan Islam Radikal*, cet I. (Jakarta: CeDSos, 2003).
- Ajami, Fouad, *The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
- Asroni, Ahmad, Radikalisme Islam di Indonesia: Tawaran Solusi untuk Mengatasinya, dalam juran *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga), Volume VII, No. 1 Januari 2008.
- Barratt-Borown, Michael, *After Imperialism*, (New York: Humanities, 1970).
- Basya, M Hilaly, "Islam, Modernitas, dan Radikalisme di Asia Tenggara", *Republika*, Jumat, 24 Juni 2005.
- Biyanto, Fundamentalisme dan Ideologi Islam Modern, dalam jurnal *PARAMEDIA*, Vol. 7, No, 2, April 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995).
- Djelantik, Sukawarsini, *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010).
- Dreyfuss, Robert, *Orchestra Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist*, alih bahasa Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing (terj), (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007).
- F. Paulus, Loudewijk, *Terorisme*, Buletin Balitbang Dephan.htm. www.Depfan.com, diakses 15 Januari 2006.
- Fahmi Zarkasyi, Hamid, *Memahmi Barat*, dalam Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam *ISLAMIA* Vol. III No. 2/Januari-Maret

- 2007 (Jakarta: Institute for Study of Islamic Thought and Civilization [INSIST] dan Khoirul Bayan, 2007).
- Fakhrurrazi, *Islam Radikal antara Pemikiran dan Gerakan: Analisis Kajian dalam Perspektif Keberagamaan*, Makalah yang dipublish dalam [www. //imsakjakarta.files.wordpress.com](http://www.imsakjakarta.files.wordpress.com), diunduh pada tanggal 18 Mei 2012.
- Hasan, Noorhaidi, "Faith and Politics: the Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia." *Indonesia* 73, April 2002.
- Hasan, Noorhaidi, "Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan: Mencari Model Solusi Mengatasi Ancaman radikalisme dan Terorisme di Indonesia ." Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme* yang diselenggarakan atas kerjasama Lazuardi Birru, Menkopolhukam RI, Polri, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI pada tanggal 27-28 Juli 2010 di Hotel Le Meridien Jakarta.
- Hasan, Noorhaidi, "September 11 and Islamic Militancy in Post-New Order Indonesia." Dalam K. S. Nathan dan M. Hashim Kamali (ed.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21th Century* (Singapore: ISEAS, 2005).
- Hasani *et. all*, Ismail, *Radikalisme Islam di Jabodetabek dan Jawa barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: SETARA INSTITUTE, 2011).
- Hendropriyono, AM., *Nation State di Masa Teror* (Semarang: Penerbit Rumah Kata, 2007).
- Hidayat, Nuaim, *Strategi Amerika Merusak Islam*, dalam Jurnal Kajian Islam *AL-INSAN* (Jakarta: Gema Insani Press], No. 2 Vol. 1, tahun 2005)
- <http://salahudin-yuswa.blogspot.com/2012/04/gerakan-salafi-radikal-di-indonesia.html> diunduh pada tanggal 16 Mei 2012.
- Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2005).

- J. Smelser, Neil, *The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions* (United Kingdom: Princeton University Press, 2007).
- Juergensmeyer, Mark, *Terorisme Para Pembela Agama* (terj), (Jogjakarta: Tawang Press, 2003).
- Kompas - (7/12/2004).
- Madjid *et. all.*, Nur Cholish *Agama dan Dialog Antarperadaban*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996).
- Madya Ruth (Ed.), Dyah, *Memutus mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*, (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010).
- Maftuh Abegebrel *et.all.*, Agus, *Negara Tuhan: The Themathic Encyclopedia*, (Yogyakarta: SR-INS Publishing, 2004).
- Miftahuddin, "Terorisme: Antara Kolonialisme dan Fundamentalisme" dalam *MILLAH Jurnal Studi Agama* Vol. 6, No. 1 Agustus 2006.
- Nur Fuad, Ahmad, *Interrelasi Fundamentalisme dan Orientasi Ideologi Gerakan Islam Kontemporer: Survei Pendahuluan*, Makalah yang dipublish dalam www.sunananempel.ac.id, diunduh pada tanggal 18 Mei 2012.
- P. Huntington, Samuel, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, (New York: Touchtone Books 1996).
- Reinhard Golose, Petrus, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010).
- S. Awwas, Irfan, *Islam Radikal di Mata Kaum Sekuler* dalam <http://majalah.temppointeraktif.com>. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2012.
- S. Herman, Edward, *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- S. Herman, Edward, *The Real Teror Network: Terorisme in Fact in Propaganda*, (Boston: South End Press, 1982).
- Said Damanik, Ali, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002).
- Smith, Anthony, *The Geo Politics of Information: How Western Culture Dominates the World*, (New York: Oxford University Press, 1980).

Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat*, (New York: Longman London, 2000).

Widjajanto, Andi, “Kajian Terhadap Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Politik Hukum”, dalam laman, <http://www.lawmuliadi.com> Diakses pada tanggal 9 April 2011.

Zakaria, Rusydi, “Studi Awal tentang Kelompok-Kelompok Keagamaan di Kampus Universitas Padjajaran.” *Pena Mas: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. 20 Juli 1995.